



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : SP DIPA-110.01-0/2026**



DS:7426-0188-8759-2800

**A. DASAR HUKUM :**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

**B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :**

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2. UNIT ORGANISASI : 110.01 SEKRETARIAT JENDERAL
3. PAGU : Rp.251.978.173.000  
(DUA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

**C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :**

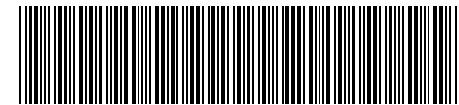
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN  
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-110.01-0/2026**



**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2. UNIT ORGANISASI	: 01	SEKRETARIAT JENDERAL
3. PAGU	: Rp.251.978.173.000	

(DUA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

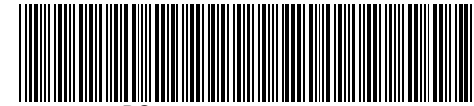
**B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :**

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	37.022.541
	: 110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	214.955.632
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik	
3. FUNGSI	: 01	PELAYANAN UMUM	251.978.173
SUB FUNGSI	: 0101	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	251.978.173
4. PRIORITAS NASIONAL	: 07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	36.602.541
NON PRIORITAS NASIONAL	:		215.375.632



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-110.01-0/2026**



DS:7426-0188-8759-2800

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		37.022.541
SP01	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif		
IKP01	Persentase temuan maladministrasi yang telah diselesaikan serta tindakan korektif dan rekomendasi yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	94,98 %	
IKP02	Persentase K/L/D yang meningkat kualitas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publiknya	30 %	
IKP03	Persentase kelompok masyarakat peduli maladministrasi yang terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	88 %	
IKP04	Tingkat kepuasan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	3,37 Nilai	
5618	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		24.009.278
01.01	Persentase daerah dengan laporan/pengaduan masyarakat yang meningkat pada lokasi penyelenggaraan akses pengaduan pelayanan publik	90 %	
01.02	Rata-rata waktu penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat	123 Hari	
01.03	Rata-rata waktu Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik	178 Hari	
5619	Pencegahan Maladministrasi		12.913.263
01.01	Persentase K/L/D yang melaksanakan saran penyempurnaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	50 %	
01.02	Persentase saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan	72 %	
01.03	Persentase Asisten Ombudsman yang memanfaatkan data manajemen pengetahuan	15 %	
01.04	Tingkat pemahaman kelompok masyarakat terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	62,5 Nilai	
5731	Manajemen Mutu		100.000
01.01	Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	99 %	
01.02	Rata-rata waktu penyelesaian aduan	45,98 Hari	
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen		214.955.632



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-110.01-0/2026**



DS:7426-0188-8759-2800

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
SP01	Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat		
IKP01	Nilai Reformasi Birokrasi	85,00 Nilai	
4051	Perencanaan dan Keuangan		30.000
	01.01 Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,35 Indeks	
4191	Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		10.000
	01.01 Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,47 Indeks	
4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi		860.000
	01.01 Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	3,14 Indeks	
4193	Pengawasan Internal		10.000
	01.01 Indeks kinerja pengawasan internal	3,01 Indeks	
5093	Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi		30.000
	01.01 Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	3,39 Indeks	
5094	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan		214.015.632
	01.01 Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan	3,31 Indeks	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025  
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP 197309161993111001



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-110.01-0/2026**



**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
 2. UNIT ORGANISASI : 110.01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 3. PAGU : Rp.251.978.173.000  
 (DUA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		0	37.022.541	0	0	37.022.541	0
	01	DKI JAKARTA		0	37.022.541	0	0	37.022.541	0
	439624	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	KP	0	37.022.541	0	0	37.022.541	0
	A00	RM		0	37.022.541	0	0	37.022.541	0
	110.01.WA	Program Dukungan Manajemen		139.563.918	74.728.171	663.543	0	214.955.632	650.000
	01	DKI JAKARTA		139.563.918	74.728.171	663.543	0	214.955.632	650.000
	439624	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	KP	139.563.918	74.728.171	663.543	0	214.955.632	650.000
	A00	RM		139.563.918	74.728.171	663.543	0	214.955.632	650.000
		TOTAL		139.563.918	111.750.712	663.543	0	251.978.173	650.000
		RM		139.563.918	111.750.712	663.543	0	251.978.173	650.000
		PENDAPATAN						0	

**KETENTUAN**

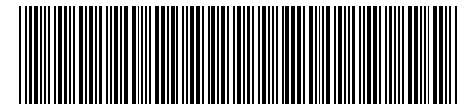
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025  
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP 197309161993111001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA-110.01-0/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
 2. UNIT ORGANISASI : 110.01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 3. PAGU : Rp.251.978.173.000  
 (DUA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

**B. RENCANA PER PROGRAM**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik RENCANA PENARIKAN DANA	37.022.541	3.062.647	3.062.647	3.067.647	3.082.647	3.101.167	3.112.647	3.122.647	3.113.597	3.108.177	3.062.647	3.062.647	3.063.424
2	110.01.WA	Program Dukungan Manajemen RENCANA PENARIKAN DANA	214.955.632	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.912.602	17.917.010
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA			251.978.173	20.975.249	20.975.249	20.980.249	20.995.249	21.013.769	21.025.249	21.035.249	21.026.199	21.020.779	20.975.249	20.975.249	20.980.434
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 01 Desember 2025  
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP 197309161993111001